

TAHUN 2024

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKJIP SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
1. LATAR BELAKANG.....	2
2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI	3
3. STRUKTUR ORGANISASI	4
BAB II.....	7
PERENCANAAN KINERJA	7
1. VISI & MISI.....	7
2. TUJUAN	10
3. SASARAN	10
4. PERJANJIAN / PENETAPAN KINERJA	10
BAB III.....	15
AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
1. CAPAIN KINERJA ORGANISASI	16
2. REALISASI ANGGARAN	21
BAB IV	24
PENUTUP	24
KESIMPULAN	24

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu dibentuk dengan Peraturan Daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam tata laksana menyelenggarakan fungsi-fungsi staf dengan tugas pokok dan fungsi DPRD dapat terlaksana dengan baik, berhasil guna dan berdaya guna bagi kepentingan masyarakat.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu:

1. Kedudukan

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, yang dipimpin oleh sekretaris Dewan yang secara teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, dan kepegawaian, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyiapkan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3. Fungsi

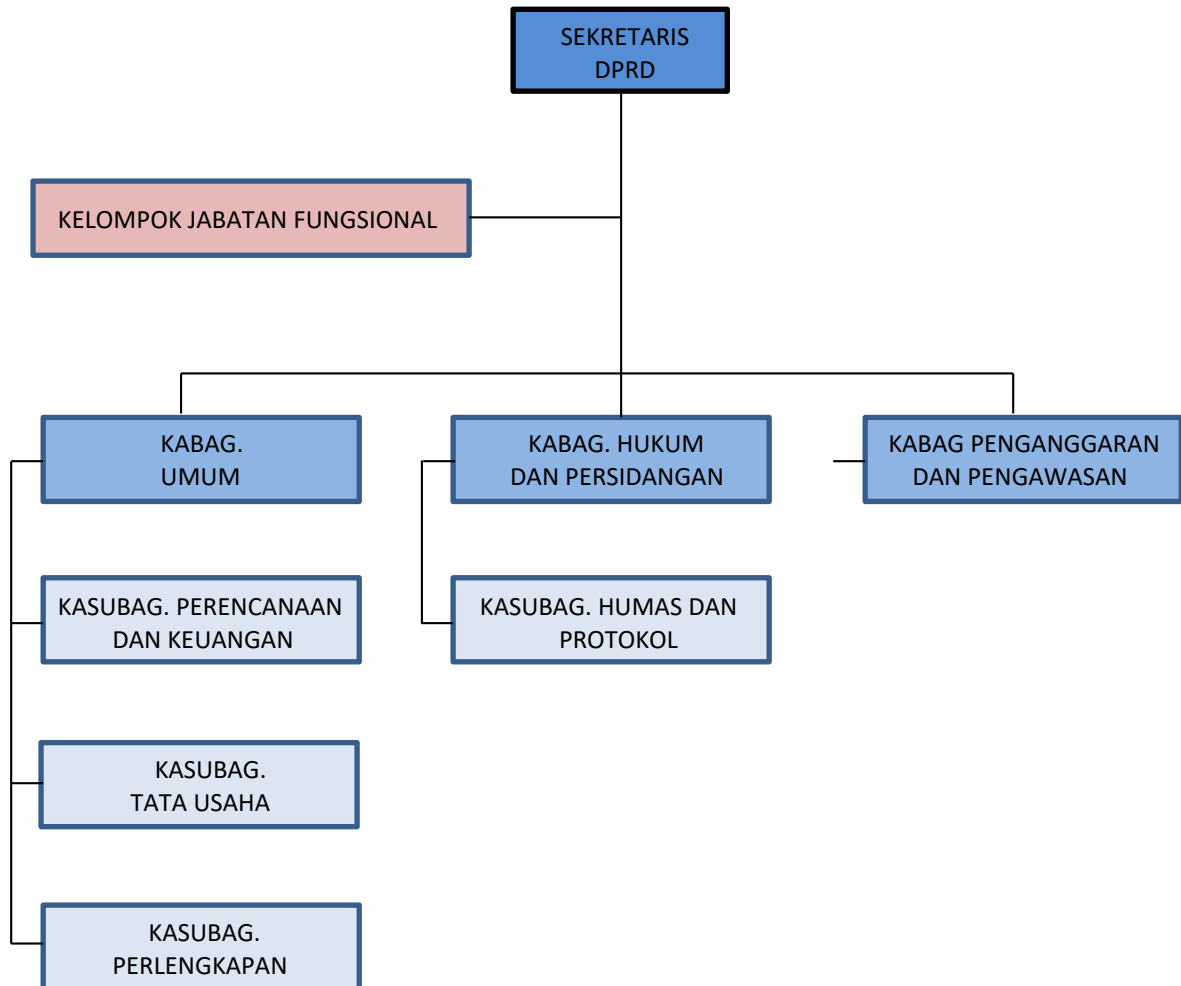
Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggara administrasi keuangan DPRD, penyelenggara administrasi kepegawaian DPRD, penyelenggara rapat-rapat DPRD, dan penyediaan serta pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023, susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Dewan
2. Kepala Bagian Umum terdiri atas :
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kepala Sub Bagian Perlengkapan
3. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan terdiri atas :
 - a. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol
4. Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan terdiri atas :
5. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Jabatan Pelaksana

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar berikut ini :



Jumlah ASN pada Sekretariat DPRD Kab. Luwu sebanyak 45 orang yang terdiri dari:

- a. Golongan IV = 4 orang
- b. Golongan III = 31 orang
- c. Golongan II = 4 orang

Dari jumlah 40 orang ASN Sekretariat DPRD Kab. Luwu, klasifikasi pendidikan masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pasca Sarjana (S2) = 5 orang
- b. Sarjana (S1) = 30 orang
- c. Diploma 3 (D3) = 1 orang
- d. SMA = 4 orang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu diberikan tugas sebagai unsur pelayanan terhadap Anggota Dewan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu melaksanakan fungsi sebagai :

1. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggara administrasi keuangan DPRD
3. Penyelenggara administrasi kepegawaian DPRD
4. Penyelenggara rapat-rapat DPRD
5. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

1. VISI & MISI

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Bupati dan Wakil Bupati Luwu Mengusung Misi:

“LUWU SEBAGAI DAERAH YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA DALAM NUANSA RELIGI”

Pada rumusan Visi Kabupaten Luwu 2019-2024 terkandung 4 (empat) frasa yang penting untuk diberikan penjabaran makna atau terdapat 4 (empat) pilar pokok yang penting untuk diberikan penjelasan, yaitu :

Maju : Kondisi masyarakat yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi, yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi, ekonomi yang merata, sumber daya manusia yang berkualitas (adaptif dan kompetitif), derajat kesehatan yang membaik, dan terpenuhinya hak

pendidikan dasar, tercapainya tujuan pembangunan fisik dan non fisik, serta birokrasi yang profesional, inovatif, dan responsif.

- Sejahtera : Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Luwu memiliki tata kehidupan dan penghidupan, mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan (material maupun spiritual), yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan tentram.
- Mandiri : Mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
- Religi : Kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya, yang tercermin dalam tatanan kehidupan

Dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : Peradaban Manusia yang Maju, Masyarakat yang sejahtera, ekonomi yang mandiri dan kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang religius. Keempat hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kabupaten Luwu.

Adapun Misi tersebut terdiri dari:

1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja;
5. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat kabupaten luwu yang religius;
7. Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;

8. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan;
9. Penegakan supremasi hukum, hak azasi manusia untuk mendorong partisipasi publik;
10. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.

Berdasarkan Visi dan ke sepuluh misi tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu menetapkan Visi dan Misi SKPD akan mengacu pada Misi Ke-Satu dan Ke-Sembilan dari Misi Pemerintah Kabupaten Luwu, Yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa amanah transparan dan akuntabel” dan “Penegakan supremasi hukum, hak azasi manusia untuk mendorong partisipasi publik.”.

Adapun Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu adalah **“Terwujudnya Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Sebagai Fasilitator dan Mediator Pada Kegiatan DPRD Kabupaten Luwu”**. Dalam menunjang Visi tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu telah menetapkan Misi :

1. Mengemabangkan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia agar tercapai pelayanan prima;
2. Menjalin dan mengembangkan hubungan kerjasama internal maupun eksternal agar tercapai iklimkerja yang kondusif;
3. Mengembangkan sarana dan prasarana dalam rangka pencapaian pelayanan prima;
4. Menigkatkan kuantitas dan kualitas aparatur /pegawai agar lebih efektif, handal dan profesional;
5. Mengupayakan peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan terhadap pelaksanaan sidang atau rapat Anggota Dewan;
6. Mengupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas naskah peraturan perundang-undangan DPRD Kabupaten Luwu;
7. Berperan sebagai mediator dan sekaligus sebagai fasilitator antara pihak Legislatif dengan Eksekutif dan antara Legislatif dan Masyarakat.

2. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Maka dengan mengacu pada visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten luwu mempunyai tujuan sebagai berikut yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD
2. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

3. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi Sumber Daya dalam pelaksanaan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu, sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
3. Meningkatnya Kapasitas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

4. PERJANJIAN / PENETAPAN KINERJA

Target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1, target ini masih mengacu pada target

capaian awal SKPD walaupun telah mengalami refocusing anggaran, indikator dan target capaiannya secara rinci diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Sasaran, Indikator dan Target 2024

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan Pelayanan Sekretariat Dprd Yang Berkualitas Dalam Mendukung Tugas Dan Fungsi Dprd	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Nilai Sakip OPD	Indeks	8		Sekretariat DPRD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persen	100	23.442.548.879	Sekretariat DPRD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	Persen	97	39.513.358	Bagian Umum
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	11.107.679	Bagian Umum
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4.660.000	Bagian Umum
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	4.660.000	Bagian Umum
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	4.660.000	Bagian Umum
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	4.660.000	Bagian Umum
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	9.765.679	Bagian Umum
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	Persen	98	4.197.091.153,	Bagian Umum
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	540	3.897.464.074	Bagian Umum
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	12	284.470.000	Bagian Umum
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	1	5.105.679	Bagian Umum
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3	4.945.721	Bagian Umum
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	6	5.105.679	Bagian Umum
		Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik daerah dalam kondisi baik	%	95	8.685.721	Bagian Umum
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	8.685.721	Bagian Umum

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	96	444,736,750	Bagian Umum
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	45	58,560,000	Bagian Umum
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	3,894,000	Bagian Umum
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	Bagian Umum
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	382,282,750	Bagian Umum
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	97	940,052,160	Bagian Umum
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	13,581,500	Bagian Umum
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	5,726,000	Bagian Umum
		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	60,146,040	Bagian Umum
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	24,162,500	Bagian Umum
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	217,250,000	Bagian Umum
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	47	116,374,320	Bagian Umum
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	7,900,000	Bagian Umum
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	494,911,800	Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	Persen	97	958,193,400	Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	399,993,400	Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	9,600,000	Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	548,600,000	Bagian Umum
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	90	510,496,894	Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	115,826,840	Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	266,435,590	Bagian Umum

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	177	22,717,208	Bagian Umum
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	105,517,256	Bagian Umum
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan penyelenggaraan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persen	98	15,298,830,331	Bagian Umum
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak keuangan DPRD	Org/Bulan	420	14,668,830,331	Bagian Umum
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Paket	5	630,000,000	Bagian Umum
		Layanan Administrasi DPRD	Cakupan penyelenggaraan layanan administrasi DPRD	Persen	97	1,044,949,112	Bagian Umum
		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Fraksi	10	120,845,000	Bagian Umum
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	8	924,104,112	Bagian Umum
Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatkan Kapasitas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Cakupan Ketersediaan Peraturan Daerah	Perda	83%		Sekretariat DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	PERSENTASE PENYELESAIAN PENYUSUNAN PERDA SESUAI PROLEGDA	Persen	98	8,434,537,399	Sekretariat DPRD
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Perda/Peraturan/Kajian/Naskah Akademik yang difasilitasi pembentukannya	Perda	8	1,056,859,950	Bagian Hukum & Persidangan
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	6,000,000	Bagian Hukum & Persidangan
		Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	1	877,359,950	Bagian Hukum & Persidangan
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	1	83,500,000	Bagian Hukum & Persidangan
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau	Dokumen	1	90,000,000	Bagian Hukum & Persidangan
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	Kebijakan	5	384,833,450	Bagian Penganggaran & Pengawasan
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	10,500,000	Bagian Penganggaran & Pengawasan
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	10,500,000	Bagian Penganggaran & Pengawasan
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	190,242,200	Bagian Penganggaran & Pengawasan
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	67,898,000	Bagian Penganggaran & Pengawasan
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	105,693,250	Bagian Penganggaran & Pengawasan
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	Kegiatan	2	158,293,250	Bagian Penganggaran & Pengawasan

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	2	50,100,000	Bagian Penganggaran & Pengawasan
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan	Dokumen	1	108,193,250	Bagian Penganggaran & Pengawasan
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Cakupan penyelenggaraan peningkatan kapasitas DPRD	Persen	95	1,681,662,590	Bagian Hukum & Persidangan
		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1	581,494,650	Bagian Hukum & Persidangan
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	1	763,360,000	Bagian Hukum & Persidangan
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	2	96,000,000	Bagian Hukum & Persidangan
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	10	121,500,000	Bagian Hukum & Persidangan
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	4	26,500,000	Bagian Hukum & Persidangan
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	2	10,500,000	Bagian Hukum & Persidangan
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	2	82,307,940	Bagian Hukum & Persidangan
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Cakupan penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persen	95	983,078,059	Bagian Penganggaran & Pengawasan
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	12	39,439,250	Bagian Penganggaran & Pengawasan
		Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	2	9,220,679	Bagian Penganggaran & Pengawasan
		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	934,418,130	Bagian Penganggaran & Pengawasan
		Fasilitasi Tugas DPRD	Cakupan penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persen	94	4,169,810,100	Bagian Penganggaran & Pengawasan
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	45	4,166,810,100	Bagian Penganggaran & Pengawasan
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1	3,000,000	Bagian Penganggaran & Pengawasan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$X > 85$	: Sangat Berhasil
$70 < X < 85$	: Berhasil
$55 < X < 70$	: Cukup Berhasil
$X < 55$	: Tidak Berhasil

Tingkat capaian indikator tujuan dan sasaran sekretariat DPRD kabupaten luwu merupakan salah satu faktor pendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati Luwu yang telah dijabarka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), target capaian Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.1**Target capaian Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indicator Sasaran	Target
1	Mewujudkan Pelayanan Sekretariat Dprd Yang Berkualitas Dalam Mendukung Tugas Dan Fungsi Dprd	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sakip OPD	B (Nilai 75)
2	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Ketersediaan Peraturan Daerah	83 %

1. CAPAIN KINERJA ORGANISASI

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;

2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu berdasarkan indikator tujuan dan sasaran dapat dilihat sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indicator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Mewujudkan Pelayanan Sekretariat Dprd Yang Berkualitas Dalam Mendukung Tugas Dan Fungsi Dprd	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sakip OPD	B (Nilai 75)	B (Nilai 72.25)	96.33 %
2	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Ketersediaan Peraturan Daerah	83 %	77 %	91.66 %

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Tabel Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan Pelayanan Sekretariat Dprd Yang Berkualitas Dalam Mendukung Tugas Dan Fungsi Dprd	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Nilai Sakip OPD	Indeks	75%	65%	86%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persen	100%	90%	90%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	Persen	97%	97%	100%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100 %
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	2	100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	Persen	98	98	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	540	540	100%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	12	8	66.67 %
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	1	1	100%
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3	3	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	6	6	100%
		Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik daerah dalam kondisi baik	%	95	100	100%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	100%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	96	100	100%
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	45	40	88.89%
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	7	58.33%
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	-
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	3	10%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	97	97	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	160%

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	6	100%
		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	100%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4	100%
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	47	25	53.19%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	-	0
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	4	66.67%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	Persen	97	96	98%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	9	75%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	90	90	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	3	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	28	215.3%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	177	20	11.30%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	2	40%
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan penyelenggaraan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persen	98	98	100%
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak keuangan DPRD	Org/Bulan	420	420	100%
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Paket	5	5	100%
		Layanan Administrasi DPRD	Cakupan penyelenggaraan layanan administrasi DPRD	Persen	97	97	100%
		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Fraksi	10	10	100%
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	8	8	100%
Meningkatkan Kapasitas dan Lembag	Meningkatkan Kapasitas dan Fungsi		Cakupan Ketersediaan Peraturan Daerah	Perda	83%	6	75%
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	PERSENTASE PENYELESAIAN PENYUSUNAN PERDA SESUAI PROLEGDA	Persen	98	98	100%
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Perda/Peraturan/Kajian/Naskah Akademik yang difasilitasi pembentukannya	Perda	8		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8
a Perwakilan Rakyat Daerah	Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pmbentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	1	100%
		Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	1	1	100%
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	1	1	100%
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	"Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau	Dokumen	1	1	100%
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	Kebijakan	5	5	100%
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	100%
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	1	100%
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	1	100%
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	1	100%
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1	100%
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	Kegiatan	2	2	100%
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	2	2	100%
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	"Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan	Dokumen	1	1	100%
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Cakupan penyelenggaraan peningkatan kapasitas DPRD	Persen	95	90	94%
		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1	1	100%
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	1	1	100%
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	2	1	50%
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	10	7	100%
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	4	4	100%
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	2	1	50%
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	2	2	100%
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Cakupan penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persen	95	90	94%
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	12	7	58.33%
		Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	2	-	-
		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	1	33.33%
		Fasilitasi Tugas DPRD	Cakupan penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persen	94	94	100%
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	45	45	100%
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1	-	-

Kinerja kegiatan tersebut pada akhir tahun hampir semuanya telah mencapai target yang diharapkan, walaupun pencapaian indikator kinerja utama masih di bawah dari target, yakni Cakupan Ketersediaan Peraturan Daerah dengan target 8 perda, yang tercapai hanya 6 perda atau 75% dari target capaian.

2. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024.

Untuk melihat pembiayaan selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Program, Kegiatan, Pagu & Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2024

KEGIATAN	BELANJA		
	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAKBUPATEN KOTA	23.442.548.879	21,140,697,676	90.18%
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	39.513.358	12,468,150	31.55%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.107.679	5,636,950	50.74%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.660.000	-	0%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.660.000	637,500	13.68%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.660.000	-	0%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.660.000	-	0%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.765.679,	6,193,700	63.42%
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	4.197.091.153,	3,885,617,067	92.57%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.897.464.074	3,695,768,467	94.82%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	284.470.000	183,320,000	64.44%

KEGIATAN	BELANJA		
	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.105.679	-	0%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.945.721	4,704,350	95.11%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.105.679	1,824,250	35.72%
Administrasi Barang Milik Daerah	8.685.721	5,600,000	64.47%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.685.721	5,600,000	64.47%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	444,736,750	104,645,469	23.52%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	58,560,000	26,400,000	45.08%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3,894,000	1,470,000	37.75%
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	0	0	0%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	382,282,750	76,775,469	20.08%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	940,052,160	515,027,913	54.78%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,581,500	7,828,000	57.63%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,726,000	0	0%
Penyediaan Bahan Logistik	60,146,040	31,628,000	52.58%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24,162,500	16,686,200	69.05%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	217,250,000	76,060,000	35.01%
Penyediaan Bahan/Material	116,374,320	68,101,750	58.51%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	7,900,000	0	0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	494,911,800	314,723,963	63.59%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	958,193,400	856,343,935	89.37%
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	399,993,400	361,243,935	90.31%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,600,000	5,600,000	58.33%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	548,600,000	489,500,000	89.22%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	510,496,894	222,360,130	43.55%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115,826,840	64,198,450	55.42%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	266,435,590	135,229,305	50.75%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22,717,208	7,860,000	34.59%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105,517,256	15,072,375	14.28%
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	15,298,830,331	14,785,302,862	96.64%
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14,668,830,331	14,155,302,862	96.49%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	630,000,000	630,000,000	100%
Layanan Administrasi DPRD	1,044,949,112	753,332,150	72.09%

KEGIATAN	BELANJA		
	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
Fasilitasi Fraksi DPRD	120,845,000	103,000,000	85.23%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	924,104,112	650,332,150	70.37%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	8,434,537,399	6,928,674,184	82.14%
<i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>	1,056,859,950	1,029,428,976	97.40%
Penyusunan dan Pembahasan Program Pmbentukan Peraturan Daerah	6,000,000	5,975,000	99.58%
Pembahasan Rancangan Perda	877,359,950	852,053,976	97.11%
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	83,500,000	81,400,000	97.48%
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	90,000,000	90,000,000	100%
<i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>	384,833,450	338,684,295	88.%
Pembahasan KUA dan PPAS	10,500,000	9,950,000	94.76%
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10,500,000	5,800,000	55.23%
Pembahasan APBD	190,242,200	181,937,411	95.63%
Pembahasan APBD Perubahan	67,898,000	55,362,900	81.53%
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	105,693,250	85,633,984	81.02%
<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	158,293,250	102,388,400	64.68%
Pengawasan Penggunaan Anggaran	50,100,000	28,102,500	56.09%
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	108,193,250	74,285,900	68.66%
<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>	1,681,662,590	798,845,225	47.50%
Orientasi DPRD	581,494,650	421,013,812	72.40%
Bimbingan Teknis DPRD	763,360,000	170,133,913	22.28%
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	96,000,000	40,000,000	41.66%
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	121,500,000	85,500,000	70.37%
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	26,500,000	10,562,500	39.85%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	10,500,000	2,550,000	24.28%
Penyusunan Program Kerja DPRD	82,307,940	69,085,000	83.93%
<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	983,078,059	503,413,500	51.20%
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	39,439,250	23,695,000	60.07%
Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	9,220,679	0	0%
Pelaksanaan Reses	934,418,130	479,718,500	51.33%
<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>	4,169,810,100	4,155,913,788	99.66%
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4,166,810,100	4,155,913,788	99.73%
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	3,000,000	-	0%
Total	31,877,086,278	28,069,371,860	88.05%

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari keseluruhan sasaran telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 2024 dengan capaian kinerja sangat berhasil. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misinya. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang berharga bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Sebagai bagian penutup dari LAKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2024 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, dan masyarakat.

Belopa, 4 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LUWU



Drs. H. BUSTAN, M.Si.
PKT. Pembina Utama Muda
NP. 197212171993031004